

## Bencana, Pilihan dan Kesadaran Politik Kita

Bencana alam selalu hadir sebagai peristiwa yang memadukan tragedi dan refleksi. Ia mengguncang bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi juga cara kita memahami dunia dan peran manusia di dalamnya. Setiap kali banjir melampaui tanggul, setiap kali tanah longsor meluruhkan desa yang tenang, setiap kali angin ribut merobohkan rumah yang kokoh, kita sering terburu-buru menisbatkannya kepada alam semata. Namun, dalam perspektif akademik kontemporer, bencana tidak cukup dipahami sebagai fenomena natural; ia merupakan interaksi kompleks antara dinamika alam dan pilihan-pilihan manusia, termasuk pilihan politik.

Dalam kajian kebencanaan, Wisner dkk. melalui model Pressure and Release (PAR) menjelaskan bahwa bencana terjadi karena tekanan sosial-politik yang telah lama menumpuk. Bahaya alam (hazard) hanyalah satu variabel; yang menentukan tingkat kehancuran adalah kerentanan (vulnerability) yang lahir dari ketidakadilan struktural, tata ruang yang diabaikan, serta kegagalan pemerintahan dalam mereduksi risiko.

Dengan kata lain, bencana sebenarnya telah dimulai jauh sebelum air meluap atau tanah bergerak—ia dimulai ketika sebuah kebijakan diabaikan, ketika pengawasan dilemahkan, ketika suara rakyat tenggelam dalam politik transaksional.

Ulrich Beck melalui konsep Risk Society memperkuat tesis ini: bahwa risiko-risiko modern bukan lagi semata produk alam, tetapi manufactured risks—risiko buatan manusia. Pembangunan tanpa kajian lingkungan, perizinan ekstraktif yang longgar, eksplorasi hutan yang masif, dan urbanisasi yang tidak tertata adalah contoh bagaimana arah politik menciptakan kerentanan baru. Risiko tidak lagi jatuh dari langit; ia lahir dari ruang rapat, ruang regulasi, dan ruang kekuasaan.

Di titik inilah pentingnya kesadaran politik menemukan makna yang paling menentukan. Kesadaran politik bukan



Oleh  
**Rohzali Putra Badaruddin, S.H**  
(Anggota Bawaslu Kab.Bone)

sekadar mengetahui prosedur pemilu, melainkan memahami bahwa setiap pilihan politik adalah pilihan terhadap bentuk masa depan ekologis kita. Masyarakat yang sadar politik dapat melihat bencana bukan sebagai “musibah” yang datang tiba-tiba, tetapi sebagai refleksi dari struktur kekuasaan yang mereka biarkan bekerja tanpa pengawasan.

Paulo Freire menyebut kemampuan ini sebagai kesadaran kritis—kemampuan membaca hubungan antara tindakan, kebijakan, dan dampaknya. Dalam masyarakat dengan kesadaran kritis kuat, warga tidak hanya memilih pemimpin yang populer, tetapi pemimpin yang mengerti mitigasi, memahami tata ruang, dan memiliki komitmen ekologis jangka panjang.

Dalam perspektif kebijakan publik, kesadaran politik inilah yang menggerakkan mitigasi struktural—upaya mengurangi risiko bencana

sebelum bencana terjadi. Masyarakat yang sadar politik akan menuntut tata ruang berbasis kajian ilmiah, perlindungan daerah resapan air, penguatan sistem drainase, penjagaan hutan lindung, serta alokasi anggaran mitigasi yang memadai. Mereka mempertanyakan izin pertambangan, mengawasi pembangunan di daerah rawan, dan mendorong pemimpin agar menempatkan keselamatan publik di atas kepentingan kelompok.

Hal ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketika masyarakat aktif mengawasi, mereka mencegah terjadinya penyimpangan anggaran mitigasi, memastikan evaluasi kebijakan lingkungan berlangsung rutin, dan menuntut pembangunan yang aman secara ekologis.

Kesadaran politik juga membangkitkan modal sosial sebagaimana dijelaskan Elinor Ostrom—kekuatan kolektif berbasis kepercayaan, norma, dan jaringan warga. Dalam konteks kebencanaan, modal sosial ini terwujud dalam kesiapsiagaan komunitas,

pemantauan lingkungan berbasis warga, sistem informasi lokal, dan gotong royong merawat infrastruktur mitigasi. Di daerah dengan modal sosial kuat, dampak bencana terbukti lebih kecil dan pemulihannya lebih cepat.

Ajaran agama memperkuat amanah ini. Allah SWT berfirman dalam *Surah Ar-Rum ayat 41*:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia..."

Ayat ini tidak hanya pesan teologis, tetapi juga etika ekologis: kerusakan adalah buah dari pilihan manusia.

Dalam *Al-A'raf ayat 56* ditegaskan: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."

Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa merawat bumi adalah tugas moral, spiritual, sekaligus politik. Memilih pemimpin yang merusak lingkungan adalah menyetujui kerusakan itu; membiarkan kebijakan mengancam ekosistem berarti kita turut membiarkannya.

Narasi akademik ini menjadi lebih hidup ketika dihadapkan dengan kisah nyata.

Bayangkan sebuah dusun yang tanahnya melorot perlahan setelah hujan panjang, menelan rumah dan kehidupan di dalamnya. Di balik tragedi itu, ada sejarah penebangan liar yang dibiarkan, izin tambang yang diberikan tanpa kajian, dan pemimpin yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun tanggul. Bencana itu bukan hanya tentang alam, tetapi tentang masyarakat yang kehilangan kendali atas arah politik.

Karena itu, kesadaran politik adalah solusi mitigasi yang paling mendasar. Ia ibarat akar pohon: tak terlihat, tetapi menentukan apakah pohon akan bertahan ketika badai datang. Teknologi bisa membantu, pembangunan bisa memperkuat, tetapi tanpa kesadaran politik, upaya mitigasi tak pernah berkelanjutan. Kesadaran politik memastikan setiap pilihan—baik di bilik suara maupun di ruang sosial—selaras dengan upaya menjaga keselamatan kolektif.

Pada akhirnya, mitigasi bencana bukan hanya urusan infrastruktur, melainkan



Oleh  
Rohzali Putra Badaruddin, S.H  
(Anggota Bawaslu Kab.Bone)

urusan nurani. Ia adalah bentuk cinta pada lingkungan, pada generasi muda yang akan mewarisi bumi ini, dan pada kehidupan bersama yang sangat rapuh. Ketika masyarakat memahami bahwa pilihan politik mereka menentukan apakah sungai akan tetap jernih atau menjadi sumber banjir, apakah bukit tetap hijau atau berubah menjadi kuburan longsor, apakah kota

bertahan dari guncangan atau runtuh oleh kelalaian, maka mereka memilih bukan dengan emosi sesaat, tetapi dengan kesadaran bahwa masa depan bergantung pada keputusan hari ini.

Di titik inilah politik berubah dari arena perebutan kekuasaan menjadi ruang mitigasi—ruang untuk menjaga hidup, merawat bumi, dan menjamin bahwa generasi mendatang mewarisi dunia yang aman dan bermartabat.

Maka di tengah duka akibat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah, kita semua diajak untuk berhenti sejenak—merenungkan betapa besar tanggung jawab yang kita pikul. Membangun Indonesia yang

tangguh bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas relawan, bukan hanya tugas ahli geologi, tetapi tugas setiap pemilih yang menyadari bahwa suaranya dapat menyelamatkan atau mengorbankan sebuah generasi.

Semoga dari setiap reruntuhan lahir tekad baru. Semoga dari setiap air mata tumbuh keberanian untuk menuntut pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab. Semoga dari setiap luka bangkit kesadaran bahwa politik tidak boleh lagi dipilih dengan rasa malas atau iming-iming sesaat, tetapi dengan hati yang jernih dan pengetahuan yang matang.

Dan semoga Allah SWT melindungi seluruh korban bencana, menyembuhkan yang terluka, menguatkan keluarga yang kehilangan, dan meneguhkan langkah para penyelamat dan relawan. Semoga kita menjaga kita dari bencana yang tampak maupun yang tersembunyi—baik kerusakan alam maupun kerusakan kebijakan manusia. Semoga kita diberi kemampuan untuk memilih dengan hati yang bersih dan komitmen yang tulus demi negeri yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

*Aamiin ya Rabbal 'alamin.*